

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdurrachman. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Universitas Trisakti, 1997.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Batubara, Marwan. et al. *Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai*. Jakarta: Bening Citra Kreasi Indonesia, 2006.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 6th ed. St. Paul. Minn: West Publishing, 1990.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Leihitu, Issac S. dan Fatimah Achmad. *Intisari Hukum Acara Perdata*. cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. cet. I, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- _____. *Mengenal Hukum*. cet. II. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. cet. IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Prints, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. cet. IV. Bandung: Sumur Bandung, 1975.
- _____. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rijkschroeff, B.R. *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*. Diterjemahkan oleh F. Tengker, cet. I, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001).

- Santosa, Mas Achmad. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law, 1997.
- Santosa, Mas Achmad dan Sulaiman N. Sembiring. *Hak Gugat Organisasi Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law, 1997.
- S.n. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2000.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sundari, E. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu studi Perbandingan Dan Penerapannya di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2002.
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. cet. V. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. cet. X. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. III. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. cet. XIV. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. II. edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Utrecth, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. cet. III. Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku Djakarta, 1956.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Jurnal

- Sugianto, Indro. "Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) Terhadap Negara." *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan DICTUM*, Edisi Ke-2, 2002, hal. 43.

Sembiring, Sulaiman N. “*Recognition of Standing in Environmental Litigation*”, *Indonesian Journal of environmental Law*, 1st edition. (Jakarta: ICEL, August 1996). p. 81.

Skripsi

Elisabeth, Marion. “Karakteristik Tuntutan Dalam Gugatan Warga Negara Atas Nama Kepentingan Umum (*Citizen Lawsuit*) Atas Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Studi Kasus: Perkara Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst).” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2003.

Astuti, Retno Kusumo. “Tinjauan Terhadap Pengajuan Gugatan Mengatasnamakan Kepentingan Umum (*Citizen Lawsuit*) Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst).” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2005.

Peraturan perundang-undangan

Herziene Indonesisch Reglement, diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politiea, 1995.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

Indonesia (b). Undang-Undang Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. UU No. 20 Tahun 1947.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008.

_____. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, PERMA RI No. 1 Tahun 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cet. XXXIII. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Internet

“Sidang Blok Cepu”.

<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19190&cl=Kolom>>.

23 Desember 2008.

Komisi Hukum Nasional. “Menggagas Bentuk Gugatan Actio Popularis”.
<http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Opini&op=detail_opini&id=56>. Februari 2004.

Sugianto, Indro. “Citizen Lawsuit terhadap Presiden Dikhawatirkan Gagal di Ronde Awal”.
<<http://www.hukumonline/detail.asp?id=6500&cl=berita>>. September 2002.

